

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Cetakan kedua (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Adnan Buyung .Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995).
- Andrew Murray, *Information Technology Law, The Law and Society*, (New York: Oxford University Press, 2010).
- Apeldoorn, L.J., van *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009).
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 2017).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 1995).
- Donald Albert Rumukoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Friedman, Lawrence M., *Legal Theory*, (New York: Columbia University Press, 1967).
- Haidir Rachman, *Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bekasi: CV. Intelektual Writer, 2021).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Ibrahim, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2013).
- Jack Febrian, *Menggunakan Internet*, (Bandung: Informatika, 2003).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).
- Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002).
- Mohammad Hatta, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995).
- N.E. Algra dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 2019).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Rawls, John, *A Theory of Justice, Revised Edition*, (New York: Oxford University Press, 1999).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Simorangkir, J.C.T, *Hukum Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1986).
- Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2015).
- Sjahran Basah, *Ilmu Negara*, (Bandung: Alumni, 2017).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2007).

_____, *Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2013).

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010).

Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005).

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994).

Taufiqurahman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014).

Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci*, (Jakarta: ELSAM, 2014).

Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz, dan Blandina Lintang, *Perlindungan Data Pribadi; Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif HAM*, (Jakarta: ELSAM, 2016).

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja, 2013).

Tesis:

Afitrahim, “Yurisdiksi dan *Transfer of Proceeding* Dalam Kasus *Cybercrime*”, *Tesis*, Magister Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Bagus Satryo Ramadha, “Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”, *Tesis*, Program

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.

Jurnal:

Asa Intan Primanta, “Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyalahgunaan Data Pribadi”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 4 Juli 2020.

Edy Suandi Hamid, “Peran dan Intervensi Pemerintah Dalam Perkonomian,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 4 Nomor 1, 1999.

Ervina Chintia, dkk, “Kasus Kejahatan Siber yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia dan Penanganannya”, *Journal Information Engineering and Educational Technology*, Volume 02 Nomor 02, 2018.

Indriana Firdaus, “Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 2, 2022.

Sinta Dewi, “Prinsip-prinsip Perlindungan Data Pribadi di Nasabah Kartu Kredit Mneurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 19, No. 3 2017.

Makalah:

Bagir Manan, “Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Oronomi Daerah”, *Makalah* pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000.

Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, *Makalah* Pada Penataan Hukum Administrasi, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998.

Internet:

APJII, “Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang”, <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang#:~:text=Survei%20APJII%20Pengguna%20Internet%20di,yang%20sebesar%20275.773.901%20jiwa.>, diakses pada tanggal 7 Mei 2023 pukul 10:50 WIB.

Kata Data, “Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>., diakses pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 15:20 WIB.

Suara.com, “11 Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia, Sebulan Tiga Kali Kejadian”, <https://www.suara.com/news/2022/09/02/115017/11>., diakses pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 16:06 WIB.

Tempo, “Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022”, <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022>., diakses pada tanggal 8 Mei 2023 pukul 11:07 WIB.

Wawancara:

Wawancara Penulis dengan Komjen. Pol. Drs. Putut Eko Bayu Seno, S.H. selaku Purn. Irwasum Polri di Mabes Polri pada tanggal 30 Mei 2023.

Wawancara Penulis dengan Mayjen TNI Dominggus Pakel, S.Sos., M.M., S.I. selaku Deputy II Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN di Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia pada tanggal 25 Mei 2023.

Wawancara Penulis dengan Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc., MM selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Zoom Meeting pada tanggal 25 Mei 2023.

Wawancara Penulis dengan Bapak Ir. Adrianto Gani selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) bidang Kedeputan Komunikasi Politik, Instansi Istana Presiden di Gedung III Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada tanggal 6 Juni 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.